

20  
23

POLICY  
BRIEF



# MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Dina Auliya  
Dyah Febri  
Delia Triscahya  
Aviyah  
Alfredo Akhsani

oleh :  
(202020100032)  
(202020100015)  
(202020100084)  
(202020100086)  
(202020100104)

ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

# KONTEKS

---



- 01 EXECUTIVE SUMMARY
- 02 PENDAHULUAN
- 03 TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN
- 04 REKOMENDASI KEBIJAKAN
- 05 RENCANA TINDAK KEBIJAKAN

# EXECUTIVE SUMMARY

POLICY BRIEF



Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia merupakan salah satu terobosan di bidang pendidikan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terdiri dari 4 paket, Program utamanya yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Program ini bertujuan untuk mendorong fleksibilitas dalam pembelajaran dan pengajaran di perguruan tinggi serta memberikan mahasiswa lebih banyak kebebasan dalam merancang jalur pembelajaran mereka dan mendorong dosen untuk mengadopsi metode pengajaran inovatif.



Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Sebuah tantangan inilah yang perlu diidentifikasi agar kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka bisa terus dilanjutkan dalam pelaksanaannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

# P E N D A H U L U A N

**Kampus Merdeka merupakan salah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang salah satunya memberikan kebijakan Perguruan Tinggi untuk memberikan hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Perencanaan konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya merupakan inovasi pembelajaran untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang berkualitas.**

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dalam proses pelaksanaan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ditemukan sebuah tantangan berupa kelemahan dan ancaman program Merdeka Belajar itu sendiri yang perlu menjadi perhatian dari pelaksana kebijakan sehingga mendapatkan kesimpulan apakah program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dapat diteruskan atau tidak





Kebijakan Kampus Merdeka Belajar Mandiri atau disebut juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang mulai disosialisasikan pada tahun 2020. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pendidikan 4.0 dikenal sebagai sebuah inovasi yang bercirikan pada student centered, pendekatan ini tidak hanya dapat mengembangkan mahasiswa yang berpengetahuan luas tetapi juga mampu membuat pola pikir baru yang mampu merespon tantangan kehidupan, meningkatkan kreativitas serta inovasi di berbagai aspek kehidupan.

Beberapa landasan hukum pelaksanaan program MBKM diantaranya, sebagai berikut: **(1.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; (3.) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.** Hadirnya kebijakan pembelajaran dengan Program MBKM, tentu saja memberikan banyak ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keilmuan di perguruan tinggi secara fleksibel, yang bukan hanya mengharuskan duduk di kelas untuk mengikuti perkuliahan, akan tetapi dapat menambah ilmu dan keterampilan sesuai kompetensinya, melalui program-program yang dikembangkan oleh mitra yang ada di luar kampus.

# TELAAH KRITIS TERHADAP MASALAH



POLICY  
BRIEF



Dalam proses pelaksanaan program MBKM ternyata ditemukan masalah-masalah yang perlu diperhatikan yaitu seperti pada mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) yang menjalankan program ini. Keberadaan MBKM ini sudah dimanfaatkan oleh mahasiswa UM untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan tetapi dalam penerapannya masih muncul problematika. Beberapa ulasan dari aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang mengikuti program MBKM.

Beberapa mahasiswa berkomentar mengenai :

1. Sistem administrasi yang lambat, dan terkait uang saku yang lambat dalam pendistribusiannya.
2. Dalam program kegiatan berwirausaha mahasiswa indonesia (KBMI), kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut. hal ini disebabkan kurang adanya campur tangan dari prodi dan fakultas itu sendiri sehingga program tersebut sangat kurang bahkan dukungan yang diberikan sangat terbatas.
3. Kurang jelasnya arahan dan sering terjadi miss communication dengan pihak terkait (guru di sekolah)
4. informasi mengenai pendaftaran yang cukup singkat dan terkesan mendadak.

Dalam hal ini, pihak kampus sudah cukup efektif dalam memberikan informasi dan juga fasilitas, tetapi dalam pengimplementasian kebijakan pada program MBKM ini masih harus dibenahi dengan melakukan evaluasi setiap pelaksanaannya.

Dari kesaksian beberapa peserta MBKM baik dari program kampus mengajar hingga pada program pertukaran pelajar problematika utama adalah minimnya informasi dan juga fasilitas yang diterima oleh peserta MBKM. Dengan minimnya informasi dan fasilitas yang kurang memadai, baik dari pihak kampus atau mitra menyulitkan mahasiswa untuk memperoleh kejelasan dari program yang diikutinya. Kemudian, masalah uang saku yang telah dijanjikan banyak sekali kendalanya, seperti telat atau bahkan belum menerima sama sekali. Hal ini tentu menjadi kendala sendiri bagi mahasiswa peserta MBKM khususnya peserta Kampus Mengajar, dikarenakan lokasi mengajar yang kadang jauh dari lokasi domisili sehingga dibutuhkan biaya lebih untuk uang perjalanan.



Pada identifikasi metode melalui analisis SWOT ditemukannya sebuah kelemahan dan ancaman program MBKM yang perlu menjadi perhatian :

## **S = Strength (Kekuatan)**

- Perkuliahan lebih fleksibel
- Mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk mengambil/tidak mengambil mata kuliah yang diminati/tidak diminati
- Membangun semangat kompetisi di antara mahasiswa
- Meningkatkan hardskill mahasiswa
- Jika diterapkan akan menjadi instrumen promosi kampus

## **W = Weakness (Kelemahan)**

- Mekanisme dan prosedur belum banyak dipahami perguruan tinggi
- Akan gagal jika tidak disosialisasikan dengan baik
- Dosen pembimbing akademik tidak memahami mekanismenya

## **O = Opportunity (Peluang)**

- Perguruan tinggi berkesempatan menjalin mitra yang luas
- Peningkatan nilai akreditasinya program studi
- Peluang diminati oleh calon mahasiswa

## **T = Threat (Ancaman)**

- Kekacauan sistem penilaian akademik
- Tidak semua perguruan tinggi didukung oleh sistem akademik yang baik

Program MBKM yang berbentuk sebuah kelemahan dan ancaman dapat diperbaiki dengan membenahi sistem. Sangat mungkin dilakukan dalam memperbaiki sistem, membenahi mekanisme pelaksanaan. Jika memang MBKM ini menjadi program unggulan Kurikulum Merdeka, Menteri Pendidikan harus mengevaluasi pelaksanaan MBKM dan Kurikulum Merdeka di seluruh perguruan tinggi sehingga program MBKM bisa terus dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih program studi, mengakses sumber belajar, serta mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan

## Fleksibilitas kurikulum

Memberikan mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kurikulum dapat dirancang agar lebih fleksibel, dengan opsi memilih mata kuliah lintas disiplin atau mengambil mata kuliah dari program studi lain yang relevan

## Pembelajaran Berbasis Proyek

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata di dalam dan di luar kampus. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan industri dan lembaga lainnya untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa.

## Sertifikasi Kompeten

Program sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional atau internasional. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja, serta meningkatkan daya saing mereka.

## Pendampingan Akademik

1. Menyediakan sistem pendampingan akademik yang kuat untuk memastikan mahasiswa mendapatkan bimbingan dan dukungan yang tepat dalam mengatur dan merencanakan perjalanan akademik mereka. Pendampingan ini dapat mencakup pilihan mata kuliah, pemilihan program studi, dan penentuan jalur karir.

## Akses Sumber Belajar

Meningkatkan akses mahasiswa terhadap sumber belajar yang berkualitas, seperti perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan materi pembelajaran daring. Perguruan tinggi juga dapat memfasilitasi akses ke platform pembelajaran online dan memberikan dukungan teknologi yang memadai

## Pengembangan Soft Skill

1. Mengintegrasikan pengembangan soft skills, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi, ke dalam kurikulum. Hal ini akan membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

## Pembaruan Evaluasi dan Penilaian

Merevisi sistem evaluasi dan penilaian untuk mempromosikan pengukuran yang lebih holistik atas pencapaian mahasiswa, termasuk pengakuan terhadap keterampilan dan kompetensi non-akademik



## RENCANA TINDAK KEBIJAKAN

Menyesuaikan program MBKM dengan Kurikulum Eksisting

Menerima pendaftaran mahasiswa yang ingin mengambil MBKM

Menyusun persyaratan bagi mahasiswa luar yang mengambil

Menetapkan dosen pendamping selama program MBKM berlangsung

# DAFTAR PUSTAKA

Mathar, T., Hijrana, H., Haruddin, H., Akbar, A. K., Irawati, I., & Satriani, S. (2021). The Role of UIN Alauddin Makassar Library in Supporting MBKM Program. In Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS).

Mariati, M. (2021, August). Tantangan pengembangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka di perguruan tinggi. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 749-761).

Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738-748.

Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka belajar kampus merdeka terhadap perubahan paradigma pembelajaran pada pendidikan tinggi: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30-38.

Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka belajar kampus merdeka (Mbkm): bagaimana penerapan dan kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603-614.